

POLA KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA EKANG ANCULAI

Muhammad Arif Hariyanto¹, Agus Hendrayady², Edison³
Arifhariyanto2415@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim
Raja Ali Haji

Abstract

Public-private partnership is intended to reduce the burden on local governments in carrying out regional development. This can be seen from the efforts of the Bintan Regency in Ekang Anculai Village to initiate cooperation with the private sector by PT. TUNAS PRATIWI NUSANTARA in developing a tourist area located in Ekang Anculai Village. Retrieval of data and information on the existence of a partnership pattern in the development of an anculai tourism village uses qualitative research. The theory used is the partnership theory which explains that the public-private partnership is understood as a particular project or activity. The government carries out its duties as a maker and implementer of these policies while the private sector is made as a place or forum for its implementation. All decisions regarding the implementation of development, management, operation, management and regulation both in whole and in part of the area including its facilities are absolute rights held by the private sector entirely, the BUMDesa may not interfere in this matter except by only giving advice and input according to local policies to the parties private as manager. This makes the results and objectives to be achieved are not concrete and does not seem to bring significant influence in the Village of Ekang Anculai.

Keywords: *Government-private partnership, human resource development.*

I. Pendahuluan

Perkembangan pariwisata mulai merambah ke dalam berbagai aspek seperti, *ecotourism, sustainable tourism development, village tourism* yang merupakan pendekatan pengembangan pariwisata agar dapat dilaksanakan di daerah bukan perkotaan, juga sebagai wadah untuk mengembangkan potensi yang ada khususnya di wilayah Desa. Hal yang disuguhkan oleh Desa Wisata adalah tetap terjaganya kualitas kehidupan masyarakat Desa dan keaslian daerah setempat. Keaslian tersebut mencakup keaslian ekonomi, fisik, kultur dan sosial daerah tersebut.

Pelaksanaan BUMDesa di Kabupaten Bintan telah diterapkan sejak 2016, dalam pembentukan BUMDesa pertama dibentuknya secara administrasi dibuatnya anggaran rumah tangga yang berdasarkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dimana setiap desa harus mempunyai BUMDesa. Setiap Desa yang telah membentuk BUMDesa diberikan dana dari pemerintah. Salah satu Desa yang telah membentuk BUMDesa adalah Desa Ekang Anculai. Desa Ekang Anculai merupakan salah satu Desa yang mengelola Desa Wisata. BUMDesa yang telah dibentuk diberi nama BUMDesa Anugrah Bintan. Usaha yang telah dijalankan ini merupakan bentuk kemitraan dari adanya pihak swasta dengan BUMDesa, pihak investor PT. TUNAS PRATIWI NUSANTARA ingin memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif.

Daerah Kabupaten Bintan memiliki sejumlah Desa Wisata, salah satunya di Desa Ekang Anculai yang mulai membangun Desa Wisata dalam memanfaatkan lahan tidur menjadi objek wisata.

Pada bulan Mei 2018 terjadi *MoU* antara pihak Desa Ekang Anculai dengan pihak swasta PT. TUNAS PRATIWI NUSANTARA menjalin kerjasama pengelolaan kawasan wisata Desa Wisata Ekang.

Kewajiban BUMDesa hanya mengurus sampai terbit segala perizinan yang dibutuhkan sampai kawasan wisata dapat beroperasi termasuk mengurus perpanjangan atau pembaharuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas nama PT. TUNAS PRATIWI NUSANTARA dan menciptakan kondisi yang kondusif agar kawasan wisata ini dapat berjalan lancar agar tidak ada kendala dari pihak manapun. Dari pihak swasta memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan berupa membuat keseluruhan rencana pembangunan, infrastruktur, fasilitas, sarana, dan prasarana sesuai rencana. Mengeluarkan modal berupa uang, tenaga, pikiran dan sumber daya lainnya guna menyelesaikan pembangunan.

Tinjauan Teori

Mahesti Okitasari dan Tetsuo Kidokoro (2014) melakukan penelitian tentang " *Understanding Collaborative Governance in Decentralizing Indonesia : A Dimensional Approach to Emerging Intergovernmental and Cross-sectoral Collaboration* " Studi ini membahas empiris tentang variasi interaksi kolaborasi di wilayah metropolitan di Indonesia melalui kepercayaan, kepemimpinan dan karakter budaya yang berpotensi untuk memberikan kontribusi kepada kolaborasi tersebut. Kata lainnya, aktor-aktor dalam kolaborasi melakukan hubungan yang terbuka untuk saling berpartisipasi untuk membangun kapasitas institusi.

Astri Maya Rosita Manalu (2017) melakukan penelitian tentang " *Kemitraan Antara Pemerintah – Swasta Dalam Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing (Studi di Kota Batam)* " penelitian ini membahas tentang kondisi kemitraan yang terjadi pada pemerintahan kota Batam dengan pihak-pihak swasta yang ada di Batam. Adapun tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan struktur pemerintahan dalam fungsi atau peran dan jejaring antara aktor dalam pembangunan berbasis daya saing di kota Batam.

Yuliana Isnaningtyas (2017) " *Analisis Kemitraan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang* " Pengelolaan Desa Wisata Kandri yang terletak di kota Semarang tidak hanya berpusat pada pokdarwis, pokdarwis merupakan organisasi yang menjadi payung bagi organisasi maupun lembaga masyarakat yang ada di bawahnya. Pengelolaan Desa Wisata Kandri berkerja sama dengan organisasi dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengelola Desa Wisata Kandri agar bertujuan menjadi sebuah desa wisata yang layak dijual kepada wisatawan.

RR. E. Anggraeni Eksi Wahyuni (2014) " *Sinergi Kemitraan Antara Pemerintahan, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pedesaan Tanjung Di Kabupaten Sleman* " Upaya pengembangan wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman sangat membutuhkan peran ketiga aktor (pemerintah, swasta dan masyarakat). Keberhasilan pengembangan wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman ini sangat ditentukan oleh peran ketiga aktor ini. Pengembangan wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman tidak akan berhasil jika sektor swasta maupun masyarakat lokal hanya berperan sebagai aktor tunggal. Supaya wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman ini dapat berkembang dengan baik maka harus ada upaya pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengembangan pariwisata lokal melalui kemitraan.

Fandy Kurniawan, dkk (2013) " *Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)* " Pengelolaan taman rekreasi Tirta Wisata antara Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang dengan pihak swasta yang bertujuan untuk meningkatkan kembali berbagai potensi yang dimiliki dengan melakukan berbagai kegiatan promosi di akhir pekan seperti mengadakan pagelaran musik dan kesenian daerah yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Tirta Wisata.

Sofi kohen, Dyah mutiarin (2016) " *Pemerintahan Kolaborasi dalam Pengelolaan Village Badan Usaha Milik Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah* " Ponggok Pemerintah Desa dalam mengembangkan Desa Usaha Milik TIRTA MANDIRI berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan Village

BUMN TIRTA MANDIRI di Ponggok Desa. Anggap sebagai sangat penting karena koordinasi yang dilakukan untuk pembangunan jangka panjang, bukan untuk saat saja.

Madiyono imam, dkk (2016) “ *Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa* “ Kapasitas pemerintah desa harus lebih ditingkatkan, sesuai dengan tuntutan Pemerintah Pusat yang dituangkan didalam kebijakan-kebijakan yang mengharuskan pemerintah desa untuk lebih berperan aktif dalam mensejahterakan masyarakat desa. Khususnya kebijakan dana desa, didalam APBDes 2015 terdapat penambahan dana untuk desa yang berasal dari APBN 2015, untuk itu pemerintah Desa Teluk Bakau diharapkan mampu mengelola dan mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat Desa Teluk.

Greve & hodge (2013: 57-65) menjelaskan bahwa PPP didefinisikan sebagai Kerja sama antara pelaku swasta publik di mana mereka bersama-sama mengembangkan produk dan layanan dan berbagi risiko, biaya, dan sumber daya yang terkait dengan produk dan layanan. Lalu, kemitraan dalam infrastruktur dianggap sebagai kesepakatan antara pemerintah dan satu atau lebih mitra swasta (yang termasuk dalam operator dan pemodal) yang memberikan layanan sedemikian rupa sehingga tujuan penyampaian layanan disesuaikan dengan keuntungan tujuan mitra swasta dan keefektifan penyelarasan tergantung pada transfer risiko yang cukup kepada mitra swasta. Dalam melakukan kerjasama ini, resiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilih/dibagi kepada pemerintah dan swasta dengan melibatkan investasi yang besar. Untuk menciptakan sebuah kerjasama/hubungan yang sukses sangat penting untuk memahami tujuan dan kepentingan dari masing-masing pelaku PPP.

Kemitraan pemerintah-swasta dilakukan untuk sektor-sektor tertentu yang dengan alasan politik atau hukum dianggap tidak layak untuk dilakukan privatisasi. Kemitraan bisanya muncul pada situasi dimana kompetisi dalam pasar tidak berkembang dengan baik, karena adanya monopoli alamiah atau kondisi struktur yang kurang mendukung. Dengan melihat keuntungan yang diperoleh tersebut, maka pemerintah perlu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pihak swasta sebagai investor, agar mereka bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun infrastruktur. Keterlibatan pihak swasta yang mampu menyediakan keuangan dan tenaga ahli setidaknya membantu fungsi pemerintah sebagai motor pelaksana pembangunan. Selain itu melalui PPP juga menciptakan sistem pemerintahan yang bersih karena dalam hal ini pemerintah juga bisa melaksanakan fungsi kontrol terhadap sektor swasta yang terlibat.

Proses kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan pihak swasta dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu : 1). *Service contract* merupakan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. 2). *Management contract*. Kerjasama ini tidak jauh berbeda dengan service contract. Namun yang membedakannya adalah kerjasama ini dilakukan pada tingkatan operasional manajemen dan maintenance dengan jangka waktu tiga sampai dengan delapan tahun. 3). *Lease contract* yaitu kerjasama pemerintah yang pihak swasta dalam jangka waktu sepuluh sampai dengan lima belas tahun dimana tanggung jawab manajemen, operasional dan pembaharuan kontrak lebih spesifik. 4). *Concession* merupakan kerjasama yang melibatkan pemerintah/publik dan swasta sebagai pemilik modal dalam jangka waktu 20 sampai dengan 30 tahun. 5). *Build Operate Transfer (BOT)* merupakan kerjasama PPP yang investasi dan komponen utamanya adalah peningkatan pelayanan publik dengan jangka waktu 10 sampai dengan 30 tahun. 6). *Joint Venture Agreement* adalah PPP dimana investasi dan risikonya ditanggung bersama antara pemerintah dan pihak swasta. Disini tidak ada batasan waktu hanya berdasarkan kesepakatan saja. 7). *Community Based Provision (CBP)* merupakan Kerjasama perorangan / keluarga / perusahaan kecil merupakan kerjasama perorangan / keluarga / perusahaan kecil yang merepresentasikan kepentingan tertentu dengan menegosiasikannya kepada pemerintah dan NGO.

Berdasarkan beberapa jenis PPP yang telah dijelaskan tersebut maka dari beberapa keunggulan dan kelemahan yang dimilikinya tidak dapat ditentukan jenis PPP yang tepat. Kesemuanya ini

tergantung pada jenis kegiatan atau proyek, manfaat kegiatannya, jangka waktu pembangunannya hingga baru bisa ditentukan jenis PPP yang dibutuhkan.

Collaborative governance itu sendiri juga tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. Keharusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik merupakan bagian dari proses penyelenggaraan negara.

Menurut Ansell & Gash (2008: 544-549), *collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non state* didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsesus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan atau mengatur program publik atau aset.

Kolaborasi secara umum bisa dibedakan ke dalam dua pengertian yaitu kolaborasi dalam arti proses, dan kolaborasi dalam arti normative : a). Kolaborasi dalam arti proses, Kolaborasi dalam arti sebuah proses merupakan serangkaian kegiatan atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional. B). Kolaborasi dalam arti normative, Kolaborasi dalam arti ini terkait dengan tujuan atau aspirasi pemerintah dalam melakukan interaksi dengan para partner atau mitranya.

Sebuah kolaborasi antara pemerintah dengan swasta menurut Huxham & Vangen (2000: 341-345) mengatakan kolaborasi sering dianggap terdiri dari sejumlah organisasi teridentifikasi yang terlibat dalam hubungan kerja satu sama lain secara sederhana tetapi memungkiri realitas bentuk kolaboratif yang nyata. Pada nilai nominal, konseptualisasi terdengar sederhana tetapi memungkiri realitas bentuk kolaboratif nyata. Biasanya, sistem tata kelola kolaboratif memiliki struktur yang menampilkan fitur yang sangat kompleks dalam beberapa hal. Ini berimplikasi pada kepraktisannya sebagai mekanisme tata kelola.

Dalam bagian ini, enam dimensi kompleksitas struktural yang saling terkait dibahas. Terdiri dari : Hubungan kerja dalam suatu kolaborasi dapat, dan sedang, di mana saja di sepanjang spektrum ini. Memang, dalam banyak kolaborasi, tingkat keterlibatan bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain. Personel dari agensi arus utama melakukan kontak harian, perwakilan dari organisasi lain biasanya hanya terlibat pada pertemuan formal kolaborasi. Kerja bersama dapat mengambil berbagai hal mulai dari komite formal hingga interaksi informasi.

Keanggotaan kolaborasi dapat dianggap sebagai organisasi (huxham dan vangen 2000a). sementara individu yang terlibat kadang-kadang dengan jelas mewakili organisasi mereka dan memiliki dukungan dan sumber daya untuk memanfaatkan, dalam situasi lain organisasi hanya relevan sejauh mereka memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam kapasitas pribadi. Terkadang organisasi anggota jelas merupakan sub-bagian dari organisasi yang lebih besar. Di sisi lain, kolaborasi tata kelola juga melibatkan para anggota yang merupakan kolaborasi itu sendiri. Kelompok payung organisasi masyarakat dan konfederasi organisasi dalam suatu sektor adalah contoh khas. Ini mungkin juga memiliki anggota yang merupakan kolaborasi. misalnya, kelompok payung sering menyertakan kolaborasi komunitas di antara anggota mereka.

Kompleksitas struktural berkaitan dengan struktur tata kelola kolaborasi itu sendiri (huxham dan vangen 2000a). Relatif jarang ditemukan kolaborasi yang diwujudkan hanya melalui pertemuan rutin kelompok pengarah atau komite manajemen. Biasanya ada juga staf yang dipekerjakan oleh kemitraan. Beberapa kolaborasi menciptakan organisasi baru - mungkin perusahaan terbatas dengan dewan direksi sendiri - di mana untuk mencari staf. dewan, yang bertanggung jawab untuk meratifikasi (jika tidak menciptakan) keputusan kebijakan, biasanya terdiri dari individu-individu dari organisasi anggota. Namun, dalam kolaborasi dengan keanggotaan besar, hanya sejumlah kecil organisasi yang dapat diwakili secara langsung dengan cara ini.

Struktur tata kelola kolaborasi sering sangat dipengaruhi oleh pemerintah atau lembaga donor lain yang menentukan setidaknya persyaratan minimal tentang pihak-pihak yang harus dilibatkan, yang mana di antaranya harus mengambil tanggung jawab utama dan struktur pelaporan yang harus ada.

Kompleksitas struktural adalah apa yang disebut Stewart (1998) 'pluralisme', merujuk pada ekspansi besar, dalam beberapa tahun terakhir, dalam jumlah kemitraan yang saling terkait di banyak tempat. Ini muncul sebagian dari 'mode manajemen' saat ini, tetapi juga karena pengakuan bahwa masalah sosial yang kompleks hanya dapat diatasi melalui inisiatif multi-partai. Efeknya telah digambarkan oleh beberapa orang sebagai 'kemitraanitis' atau 'penyakit zona gila' (Huxham dan Vangen 2000c). Sweeting et al (1999) mengamati bahwa tokoh-tokoh lokal utama hadir pada pertemuan-pertemuan lokal yang lebih dari kemitraan yang terpisah tetapi saling terkait. Di Bristol, misalnya, dua puluh satu orang menempati lima puluh enam tempat di sembilan dari kemitraan Bristol utama atau struktur kerja bersama.

Kompleksitas struktural berkaitan dengan kurangnya kejelasan tentang siapa sebenarnya anggota kolaborasi (Huxham dan Vangen 2000a). Telah diperdebatkan bahwa memiliki keanggotaan eksplisit di mana para pihak 'mengetahui dan menyetujui siapa yang terlibat dan dalam kapasitas apa' adalah elemen definisi kunci kolaborasi (Roberts dan Bradley 1991). Dalam banyak kolaborasi bahkan individu-individu yang aktif secara terpusat tidak dapat menyebut organisasi anggota dengan tingkat kepastian dan adalah hal biasa bagi individu untuk memberikan deskripsi tentang struktur keanggotaan yang tidak sama satu sama lain (Huxham dan Vangen 2000a).

Kompleksitas struktural sebagai perubahan terus-menerus. Kebijakan pemerintah mempromosikan inisiatif baru dan juga mengubah tujuan yang sudah ada. Struktur kompleks yang dijelaskan pada bagian sebelumnya karena itu relatif sementara. Deskripsi apa pun tentang bagaimana suatu kolaborasi disusun dapat dengan demikian hanya berlaku pada titik waktu kolaborasi itu dibuat. Pemahaman nyata tentang struktur kolaboratif perlu memperhitungkan sejarahnya dan menantikan perubahan di masa depan.

Permasalahan dalam penelitian melihat "Bagaimana Proses Pola Kemitraan Dalam Pembangunan Desa Wisata Ekang Anculai?" dan juga untuk mengetahui Pola Kemitraan Dalam Pembangunan Desa Wisata Ekang Anculai.

II. Metode Penelitian

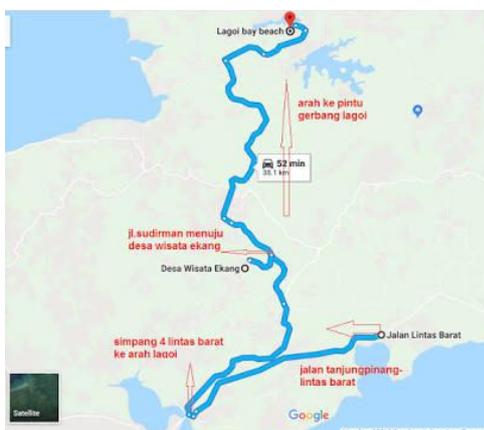
Penulisan penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam memperoleh data dan informasi lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. Fokus penelitian metode kualitatif bersifat deskriptif yang meliputi : Tempat dan Aktor. Tempat penelitian yang peneliti ambil yaitu di Desa Ekang Anculai Kabupaten Bintan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan. Aktornya adalah masyarakat, BUMDesa dan Pihak Pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi sasaran penelitian, dan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain menggunakan jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, artikel-artikel dan publikasi pemerintah. Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a). Observasi, b). Interview (wawancara), c). Dokumentasi.

Pemilihan informan mengambil *snowball sampling*, yang berpegang pada pendapat Sugiyono (2011) "*snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel." Adapun yang menjadi *informan* berjumlah 6 orang adalah :a). Sekretaris Desa Ekang Anculai, b). Ketua BUMDesa Ekang Anculai, c). Manajer pengelola desawisata di Desa Ekang Anculai, d). Kasi Kesra Desa Ekang Anculai, e). Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan (2 Orang)

Analisis data yang digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari penelitian ini. Alur kegiatan untuk analisis data penelitian kualitatif ini yaitu sebagai berikut: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Ekang Anculai merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Teluk Seborg, Kabupaten Bintan, provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Desa Ekang Anculai memiliki luas wilayah 10.5 dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 35 meter yang banyak curah hujan 85 Mm/Th dan bersuhu maksimum/minimum 30°C / 37°C.



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Wisata Ekang Anculai

Beberapa permasalahan yang dianalisis dilihat dari proses kemitraan yaitu ditemui adanya kemitraan antara BUMDesa dengan swasta dapat berjalan baik sampai saat ini, karena terjalinnya kemitraan ini masih terbilang baru dari tahun 2018 dari terbentuknya *MoU* dalam sebuah kesepakatan antara pihak BUMDesa dengan swasta dalam pembangunan Desa Wisata Ekang yang terletak di Desa Ekang Anculai. Kemitraan ini menimbulkan dampak yang baik bagi Desa karena dapat meningkatkan sumber daya manusia dan PAD Desa bagi Desa Ekang Anculai. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin dalam sebuah kemitraan ini Desa Ekang Anculai juga masih berdampak baik bagi pihak BUMDesa dengan swasta. Dari pihak Dinas Pariwisata juga masih berjalan baik karena dari Dinas Pariwisata ada setiap bulannya memantau bagaimana perkembangan kemitraan yang terjalin di Desa Ekang Anculai.

Tentunya dalam sebuah kemitraan yang terjalin pasti ada manfaat dan keuntungan bagi pihak Desa dan swasta dalam sebuah hubungan kerja sama yang masih terjalin. Hal ini tertera dalam kesepakatan *Mou* bahwa pihak Desa hanya mendapatkan 10% dari harga tiket setiap bulannya dan 90% dari harga tiket maupun harga wahana permainan yang ada di Desa Wisata Ekang semuanya untuk pihak swasta. Tetapi dari hasil pendapatan di Desa Wisata Ekang saat ini mengalami penurunan dari periode Januari – Maret di tahun 2019. Bagi pihak masyarakat Desa Ekang Anculai masih belum menerima manfaat dan keuntungan adanya Desa Wisata Ekang karena belum seluruhnya masyarakat di Desa Ekang Anculai pernah masuk ke Desa Wisata karena dari harga tiket masih disamakan dengan harga tiket normal untuk para wisatawan luar. Hal ini menimbulkan hambatan dan kesulitan bagi pihak BUMDesa dan swasta dalam menjalin kerja sama maupun kemajuan bagi Desa wisata Ekang, yaitu bagi BUMDesa tidak boleh ikut campur dalam menambahkan kegiatan atau menambahkan sesuatu dalam Desa Wisata karena bukan hak nya pihak BUMDesa, karena dalam sebuah pembangunan ataupun proses Desa Wisata hanya pihak swasta yang berhak melakukan. Akses menuju ke Desa Wisata Ekang masih mendapatkan kendala yaitu karena jalannya masih tanah liat dan belum diaspal hal berdampak buruk bagi wisatawan yang menuju ke Desa Wisata tersebut. Dan bagi masyarakat Desa Ekang Anculai kenak dampaknya karena berpolusi dan debu bertebaran disaat musim kemarau.

Terjalannya kemitraan ini bagi pihak pemerintah dan swasta, yaitu bagi Desa, BUMDesa dan Dinas Pariwisata menimbulkan harapan dalam sebuah kemitraan yang terjadi di Desa Ekang Anculai terhadap Desa Wisata Ekang. Hal ini masih berdampak baik dan positif dengan adanya kemitraan ini terhadap BUMDesa dan swasta dan berharap dapat menjalin kemitraan ini agar Desa Wisata Ekang

dapat terus berkembang dan meningkatkan pendapatan dari wisatawan yang datang. Sedangkan peneliti juga menganalisis melalui 6 dimensi dalam kolaborasi, Yaitu :

Hubungan Kerja

PPP ini merupakan hubungan kerjasama pemerintah dengan publik dalam pelaksanaan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan NGO. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan. Peran dan fungsi pemerintah khususnya BUM Desa E kang Anculai sebagai suatu institusi resmi yang hanya bertugas untuk melakukan perizinan atau yang terkait dengan peraturan dalam pembangunan Desa Wisata ekang tidak lebih dari itu dan swasta yang melakukan semua pembangunan Desa Wisata Ekang. Hubungan pekerjaan dalam kolaborasi antara pihak BUM Desa dengan swasta dalam pembangunan Desa Wisata yang ada di Desa Ekang Anculai masih sangat baik dari segi komunikasi ataupun kerja sama, antara Pihak Desa maupun Dinas Pariwisata dengan Swasta karena kerja sama ini dalam pembangunan Desa Wisata di Desa Ekang Anculai masih terbilang baru dan belum ada kendala apapun sampai saat ini.

Keanggotaan Organisasi

Dalam pembangunan Desa Wisata yang ada di Desa Ekang Anculai keanggotaan aktor yang bermaksud disini merupakan suatu kolaborasi antara pemerintah dengan swasta lainnya untuk mengembangkan pariwisata dalam segi desa wisata sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya masyarakat yang ada di Desa Ekang Anculai dan meningkatkan PAD Desa yang bisa berkembang dengan adanya keikutsertaan swasta dalam pengelolaan atau pembangunan Desa Wisata di daerah Bintan khususnya Desa Ekang Anculai.

Tata Kelola dan Struktur Tugas

Secara umum dikatakan bahwa tata kelola organisasi adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan seluruh pihak yang berkepentingan (*stake/wider*) terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka, yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak Desa tidak mengetahui bagaimana struktur dan tata kelola dalam pengembangan Desa Wisata ekang, Desa hanya tau bahwa BUMDesa yang mengurus segala perizinan dan peraturan-peraturan untuk membangun Desa Wisata. Hanya BUMDesa dan pihak swasta yang mengetahui bagaimana struktur dan tata kelola pembangunan Desa Wisata ekang untuk menuju proses yang lebih baik untuk meningkatkan pengunjung disetiap tahunnya.

Pluralitas

Pihak BUMDesa dan pihak Desa dalam melakukan konsep kerja sama dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Ekang Anculai ini harus berbeda dengan Desa Wisata lainnya yang ada di Kabupaten Bintan dan menerima kalau ada pihak swasta lain yang ingin berkerja sama dengan BUMDesa untuk membangun Desa Wisata kita persilahkan, hal ini juga berdampak positif bagi Desa Ekang Anculai dan dikenal oleh masyarakat luas.

Ambiguitas

Dalam kerja sama yang besar antara Desa dengan swasta dalam membangun Desa Wisata merupakan kerja sama yang jelas dan tertulis yang benar, tidak ada kebingungan atau ketidakjelasan antara kerja sama dalam hal ini agar Desa Wisata Ekang dapat terlaksana. Dalam hal ini terjadi ambiguitas tentang hubungan antara kelompok kerja, individu dalam hal kolaborasi, dan kolaborasi orangtua seperti pekerja yang ada di Desa Wisata Ekang tidak semuanya pekerja tersebut berasal dari masyarakat Ekang Anculai ada juga dari pekerja luar.

Dinamika

Tentunya suatu perubahan yang diinginkan dalam kerja sama untuk membangun Desa Wisata menjadi lebih baik. Bahwa pihak Desa, BUM Desa dan dinas pariwisata harapan yang ingin terhadap dinamika perubahan mereka dengan adanya kerja sama ini membuat mereka senang karena dengan ini mereka dapat memperkenalkan Desa Ekang Anculai di Kabupaten Bintan ini dapat dikenal oleh pihak investor lain dan meningkatkan pengunjung luar maupun lokal agar di Bintan adanya Desa Wisata yang baik dengan dengan Desa Wisata yang ada diluar.

Kolaborasi yang dilakukan antar BUMDesa dengan swasta memiliki hubungan pekerjaan yang sampai saat ini dalam tata kelola kerja sama antara pihak BUMDesa dengan swasta dalam pembangunan Desa Wisata yang ada di Desa E kang Anculai masih sangat baik dari segi komunikasi ataupun kerja sama, antara Pihak Desa maupun Dinas Pariwisata dengan Swasta karena kerja sama ini dalam pembangunan Desa Wisata di Desa E kang Anculai masih terbilang baru dan belum ada kendala apapun sampai saat ini. Hal ini kolaborasi dalam pembangunan Desa Wisata memiliki keanggotaan organisasi agar dapat terjalinnya kerja sama yang diinginkan. Seperti keanggotaan organisasi yang terjadi dalam kolaborasi antara BUM Desa dengan swasta di Desa E kang Anculai pihak swasta PT. TUNAS PRATIWI NUSANTARA yang baru masuk kedalam kerja sama antara pihak BUMDesa E kang Anculai. Pihak BUMDesa berharap adanya pihak swasta yang lain lagi untuk mengembangkan destinasi Desa Wisata yang banyak agar Desa E kang Anculai bisa meningkatkan lagi sumber daya manusia Desa E kang Anculai.

Tata kelola dan struktur tugas juga sangat penting dalam pembangunan kolaborasi antara BUMDesa dengan swasta karena suatu sistem atau proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam struktur dan tata kelola untuk pengembangan Desa Wisata E kang ini dari pihak BUMDesa dan swasta pihak Desa udah sangat jelas apa yang udah tertera di *MoU* tersebut . Bahwa BUMDesa dan swasta yang mengetahui bagaimana struktur dan tata kelola dalam pengembangan Desa Wisata, BUMDesa yang hanya mengurus pihak perizinan dan segala peraturan-peraturan yang terkait dengan payung hukum dalam pembangunan Desa Wisata dan pihak swasta yang melakukan semua perkembangan Desa Wisata dan modal 100% dari pihak swasta semua. Pluralitas yang terjadi dalam sebuah kolaborasi antara pihak BUMDesa dan swasta. Pihak BUMDesa dan pihak Desa dalam melakukan konsep kerja sama dalam pengembangan Desa Wisata di Desa E kang Anculai ini harus berbeda dengan Desa Wisata lainnya yang ada di Kabupaten Bintan dan menerima kalau ada pihak swasta lain yang ingin berkerja sama dengan BUMDesa untuk membangun Desa Wisata kita persilahkan, hal ini sudah terlaksana dan juga berdampak positif bagi Desa E kang Anculai dan dikenal oleh masyarakat luas.

Ambiguitas atau kesalah pahaman dalam kolaborasi antara BUMDesa dengan swasta dalam pembangunan Desa Wisata di Desa E kang Anculai masih ada dalam hal ini terjadi ambiguitas tentang hubungan antara kelompok kerja, individu dalam hal kolaborasi, dan kolaborasi orang tua seperti pekerja yang ada di Desa Wisata E kang tidak semuanya pekerja tersebut berasal dari masyarakat E kang Anculai ada juga dari pekerja luar. Agar terjalinnya kolaborasi yang baik antara BUMDesa dengan swasta dalam pembangunan Desa Wisata harus adanya dinamika hal ini agar suatu dinamika perubahan yang terjadi dalam struktur kolaborasi dapat mempengaruhi sistem sosial. Bahwa pihak Desa, BUMDesa dan dinas pariwisata harapan yang ingin terhadap dinamika perubahan mereka dengan adanya kolaborasi antara BUMDesa dengan swasta agar dapat berjalan dengan baik karena dengan ini mereka dapat memperkenalkan Desa E kang Anculai di Kabupaten Bintan dan dapat dikenal oleh pihak investor lain dan meningkatkan pengunjung luar maupun lokal agar di Bintan adanya Desa Wisata yang baik dengan Desa Wisata yang ada diluar.

Penelitian mengenai kemitraan banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, fokus dalam penelitian ini ingin mendeskripsikan tentang pola kemitraan dalam pembangunan desa wisata E kang Anculai. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Isnaningtyas (2017) menjelaskan bahwa adanya suatu kemitraan bagi pembangunan Desa Wisata bermanfaat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan masyarakat lebih memahami keadaan lingkungannya yang menyandang predikat Desa Wisata sehingga masyarakat harus memiliki kemampuan yang lebih demi memajukan memajukan Desanya, telah diketahui bahwa bentuk kemitraan yang ada diimplementasikan lewat berbagai kegiatan pelatihan keterampilan pembuatan produk yang melibatkan masyarakat, selain itu juga memberikan kepuasan bagi pemerintah setempat karena dengan banyaknya kemitraan yang terbangun sedikit banyak turut membantu pemerintah untuk meningkatkan pelayanan maupun pembangunan infrastruktur bagi Desa dan juga wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata, serta memberikan manfaat bagi pelaku industri yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di luar Desa Wisata dalam mempromisikan produk mereka ke lingkup yang lebih luas. Dapat disimpulkan bahwa adanya

kemitraan bagi Desa dengan swasta untuk mencapai tujuan hal yang membentuk Desa Wisata dirasa sangat penting. Dengan adanya kemitraan yang baik tentu kolaborasi antar aktor terjalin dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh RR. E. Anggraeni Eksi Wahyuni (2014) dengan menggunakan teori kemitraan, menemukan bahwa kemitraan dengan melalui kerjasama secara linear selanjutnya disebut dengan *linear collaborative of partnership*. Membutuhkan adanya kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan memiliki peran masing-masing. Peran pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata adalah kemampuan pemerintah di dalam menjalankan fungsi atau peran fasilitasi, regulasi, mediasi, stimulasi dan koordinasi terhadap swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Peran swasta dalam pengembangan pariwisata adalah kemampuan swasta di dalam menjalankan peran atau fungsinya sebagai penyedia dan penyelenggara jasa pelayanan di bidang pariwisata dalam pengembangan pariwisata. Dapat disimpulkan bahwa dari adanya sebuah kemitraan antara pemerintah dan swasta memiliki peran masing-masing dalam membangun Desa Wisata menjadi lebih baik dan jelas arahnya kemana.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti kemitraan yang diambil yaitu Pemerintah dengan swasta di Desa E kang Anculai dalam pengembangan Desa Wisata, sebagai salah satu Desa yang ada di Kabupaten Bintan Desa E kang Anculai memiliki kemitraan yang untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemitraan Pemerintah Swasta atau *Public private partnership* merupakan sebuah kontrak perjanjian antara pemerintah dan swasta yang keduanya dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuannya dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan pemerintah – swasta dilakukan melalui kerjasama dalam bentuk investasi usaha kemudian pengadaan infrastruktur. Dengan adanya 6 dimensi kolaborasi tersebut dalam sebuah pembangunan Desa Wisata yang ada di Desa E kang Anculai dapat bisa berkembang dan berjalan dengan baik.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fandy Kurniawan, dkk (2013) menjelaskan bahwa dalam adanya kemitraan akan terbentuk ada persyaratan yaitu, terdapat dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama dalam pembangunan, ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan, saling membutuhkan. Namun dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya proses terbentuknya pola kemitraan dalam pembangunan Desa Wisata di Desa E kang Anculai diantaranya yaitu pemimpin, proses berbagi pengetahuan, dan informasi dan komunikasi. Dengan adanya faktor tersebut diharapkan proses kemitraan dalam manajemen pengetahuan dapat berjalan lancar.

Manajemen pengetahuan diharapkan dapat memperlancar proses kemitraan baik pada internal organisasi maupun dari eksternal organisasi. Maka bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Desa E kang Anculai melakukan beberapa studi banding pada Desa yang ada di Kabupaten Bintan lain dalam proses penciptaan pengetahuan yang baru tentang Desa Wisata. Selain itu kemitraan yang dilakukan juga membuat peningkatan PAD Desa dari tahun-tahun sebelumnya dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Desa E kang Anculai.

IV. Kesimpulan

Hubungan kerja antaraktor dapat disimpulkan dalam hubungan kerja sama pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan pembangunan. Khususnya di Kabupaten Bintan Desa E kang Anculai yang melibatkan swasta dalam pembangunan desa wisata. Dalam hubungan kerjasama ini antara BUMDesa dengan pihak swasta memiliki peran penting untuk membantu pemerintah, mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal meningkatkan sumber daya manusia dan finansial sehingga perlu keterlibatannya dengan pihak swasta. Keanggotaan aktor dapat disimpulkan Peran yang dijalankan oleh masing-masing aktor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat saling berhubungan satu sama lain atau adanya kesatuan peran. Hal ini penting, mengingat informasi yang dimiliki oleh satu pihak dibutuhkan juga oleh pihak yang lain, sehingga proses interaksi dalam kemitraan akan berlangsung dengan lancar dengan adanya koordinasi yang baik. Tata kelola dan struktur tugas dapat disimpulkan Proses pemantauan (monitoring) dan

pengaturan (controlling) terhadap peran yang sudah dijalankan oleh masing-masing pihak, dilakukan dengan suatu forum komunikasi yang melibatkan ketiga pihak tersebut. Dalam forum komunikasi ini, pihak pemerintah, swasta dan masyarakat E kang Anculai akan saling melakukan *check dan recheck* untuk mengontrol peran masing-masing pihak. Pluralitas dapat disimpulkan keadaan yang lebih dari satu dengan harapan dapat menumbuhkan pemahaman untuk membangun saling pengertian agar dapat memperkokoh kebersamaan menghadapi kesatuan nasib manusia secara korelatif. Ini merupakan keadaan yang menumbuhkan kolaborasi antar BUMDesa dengan swasta untuk membangun keuntungan dari apa yang diinginkan BUMDesa dan swasta dari adanya pembangunan desa wisata yang ada didesa E kang Anculai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada nya desa wisata ini masih ada berdampak buruk terhadap masyarakat setempat karena jalanan menuju desa wisata ini masih belum diaspal jadi masyarakat setempat mengeluh karena disaat musim kemarau, tingkat polusi menjadi meningkat untuk rumah-rumah warga yang berada didekat jalan menuju desa wisata tersebut. Bagi pihak masyarakat didesa E kang Anculai juga tidak digratiskan masyarakat disini juga harus membayar. Hal ini membuat masyarakat protes bahkan banyak warga desa e kang anculai disini belum pernah masuk kedesa wisata tersebut. Ambiguitas dalam suatu hubungan kerjasama antara BUMDesa dengan swasta dalam membangun desa wisata merupakan kerja sama yang jelas dan tertulis, dalam sebuah *MoU* antara kerjasama ini pun udah ada kejelasan antara dalam kerja sama ini dari pihak swasta memiliki tugas dan fungsi tersendiri dan pihak BUMDesa juga memiliki tugas dan fungsinya. Dinamika perubahan bahwa pihak desa, BUMDesa dan dinas pariwisata harapan mereka dengan adanya kerja sama ini membuat mereka senang karena dengan ini mereka dapat memperkenalkan desa E kang Anculai di Kabupaten Bintan ini dapat dikenal oleh pihak investor lain dan meningkatkan pengunjung luar maupun lokal agar di Bintan adanya desa wisata yang baik dengan dengan desa wisata yang ada diluar. Sehingga ada beberapa saran yang tertuang seperti dalam hal kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan swasta sebelum terbuatnya kontrak perjanjian, dari pihak BUMDesa jangan hanya melakukan perizinan tetapi ikut dalam melakukan ide-ide kegiatan untuk meningkatkan desa wisata e kang, agar desa wisata e kang dapat menjadi lebih baik lagi dan agar dapat meningkatkan turis ke desa wisata yang ada di E kang Anculai. Struktur dalam pemerintahan dan manajemen jaringan perlu adanya sikap yang tegas dan jelas dari pemerintah desa e kang anculai sebagai pelaksana dari kebijakan. Desa wisata yang ada die kang jangan hanya wisata yang itu saja tapi perlu menambahkan lagi desa wisata yang lainnya agar dapat meningkatkan lagi sumber daya manusia dan PAD desa E kang Anculai. Kolaborasi dan Fungsi sebelum terbentuknya desa wisata e kang seharusnya dilihat dulu jalanan menuju kesana karena hal ini penting bagi masyarakat maupun pengunjung. Karena apabila disaat musim kemarau berpolusi bagi masyarakat desa E kang Anculai dan disaat musim hujan menuju ke desa wisata e kang akan susah atau terkendala kesana karena becek. Pada sektor pemerintah sebagai aktor pendukung adanya proses kerjasama ini terhadap desa wisata e kang seharusnya lebih melihat lagi kemasyarakat setempat karena dari masyarakat setempat sampai saat ini belum pernah mengunjungi ke desa wisata tersebut karena untuk masyarakat setempat harus bayar sama dengan pengunjung lain. Seharusnya dari masyarakat setempat dapat diberi kelonggaran harga untuk mengunjungi ke desa wisata tersebut dengan menunjukkan ktp supaya tau bahwa dia masyarakat desa E kang Anculai. Teori yang digunakan oleh peneliti yaitu kemitraan dan kolaborasi diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam proses menciptakan pengetahuan dalam kemitraan dan kolaborasi agar dapat menjadi lebih baik lagi dalam pembangunan desa wisata didesa E kang Anculai

V. Daftar Pustaka

BUKU/JURNAL:

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Fitriska, K. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

- Greve, C. and, & Hodge, G. A. (2013). Rethinking public-private partnerships : strategies for turbulent times. *Routledge Critical Studies in Public Management*, 10, xii, 228 pages, illustreret. <https://doi.org/10.4324/9780203108130>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: PT. Gramedia.
- Wahyuni, R. E. A. E. (2014). Sinergi kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan wisata pedesaan tanjung di kabupaten sleman, *III*, 69–104.
- Manalu, A. M. R. (2017). Kemitraan Antara Pemerintah-Swasta Dalam Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing (Studi di Kota Batam). *Journal of Personality and Social Psychology*, 1(1). <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x>
- Okitasari, M., & Kidokoro, T. (2014). Understanding collaborative governance in decentralizing Indonesia : A dimensional approach to emerging intergovernmental and cross-sectoral collaboration, *1(C)*, 82–98.
- Isnaningtyas, Y. (n.d.). Analisis Kemitraan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Oleh : Yuliana Isnaningtyas, 1–15.
- Kurniawan, F., Zauhar, S., & Hermawan. (2013). Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), 47–55.
- Madiyono, I., Muhammad, A. S., Safitri, D. P., & Levels, O. (2016). KAPASITAS PERANGKAT DESA TELUK BAKAU KECAMATAN GUNUNG (Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH), *4(2)*, 17–34.

UNDANG-UNDANG:

Permendes No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.